

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat S-2

Magister Kenotariatan

oleh :

ELIZABETH ESTININGSIH, SH

B4B002184

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK

disusun oleh :

ELIZABETH ESTININGSIH, SH

B4B002184

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 21 Maret 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima*

Menyetujui :

Pembimbing Utama

ERRY AGUS PRIYONO, SH., MSi

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



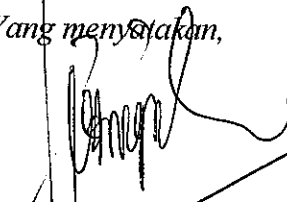
MULYADI, SH., MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2005

Yang menyatakan,



ELIZABETH ESTININGSIH, SH

ABSTRACT

POSITION AND RESPONSIBILITY OF NOTARY IN ITS RELATION TO THE HAPPENING OF MALPRACTICE. Elisabeth Estiningsih, SH. 85 Pages. Thesis. Program Study of Magister Kenotariatan, Post Graduated Program. Diponegoro University, Semarang.

Core of notary duty is to arrange textual and authentically a legal relation between the parties which general 1 consensually ordering the service of notary. Duty and authority of notary is to make notary deed also followed by notary responsibility, whether which has been determined in constitution of Notary occupation (UUJN) or Ethic Code of Notary Conduct. The important of that kind of deed is to guaranty the legal certainly, in order to protect the parties directly or indirectly.

In running its occupation to create an evidence which in the form of deed, Notary is possible to do wrong cause of his less mastering or by unintentionally, that could emerge malpractice action. Malpractice action conducted by notary in wide of meaning representing a deviation or a denial forms or can be told the lack of ability in duty execution and responsibility, either due intention or negligence which can be justified to notary for executing of his profession obligation which based on trust that given to them.

Malpractice action conducted by a notary could be happened because of some factors, among other: factor limitation of ability, ugly or low integrity and moral, economic demand or prosperity and also human resources factor and control to notary. This malpractice action does not jus causing civil law only, but also causing on criminal law. Juridical consequence and notary responsibility in the case of malpractice action could be such as in the form of responsibility pursuant to law and also ethics moral that to be accounted on by notary when they conduct malpractice action.

Data, which was used in this writing, were primary data and secondary data. Approach method, which was used in research was purposive sampling, while technique data analysis used analysis qualitative.

Based from conducted research malpractice action conducted by notary, virtually was not action that conducted intentionally and planed, but it's happened because of careless or negligence or unknown on constitution regulation that existing. So notaries is eager of legal protection in executing and running their occupation duty.

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK. Elizabeth Estiningsih, SH. 85 Halaman. Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Inti dari tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris. Tugas dan kewenangan notaris membuat akta otentik diikuti pula oleh tanggung jawab notaris, baik itu yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Perlunya dituangkan dalam bentuk akta notaris dan otentik adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, guna kepentingan serta melindungi pihak-pihak yang secara langsung maupun secara tidak langsung (masyarakat umum).

Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris untuk membuat alat bukti yang berupa akta otentik, banyak terjadi hal yang karena ketidaksengajaannya atau karena kurang menguasainya maka dapat terjadi tindakan malpraktek. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris dalam arti luas merupakan bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawab kepada notaris untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : faktor keterbatasan kemampuan, moral dan integritas yang rendah atau buruk, tuntutan ekonomi atau kesejahteraan serta faktor sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan terhadap notaris. Tindakan malpraktek ini tidak hanya berakibat pada hukum perdata saja, tetapi dapat juga berakibat pada hukum pidana. Konsekuensi yuridis dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktek dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika yang akan ditanggung oleh notaris bila mereka melakukan tindakan malpraktek.

Adapun data yang digunalam dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif dan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah metode *purposive sampling*, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah secara analisis normatif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris sebetulnya bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan berencana, tetapi karena kurang hati-hatian atau kelalaian atau ketidak tahuannya akan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk itu harus tetap ada perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan dan menjalankan tugas jabatannya sehari-hari.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan dari berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan banggaku kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis.

Meskipun hanya beberapa pihak yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak ***ERRY AGUS PRIYONO, SH., Msi.***, selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya serta dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan, selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak ***PROF. IR. EKO BUDIHARDJO, MSC*** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak ***PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)*** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak ***H. ACHMAD BUSRO,SH., Mhum.*** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak ***MULYADI, SH.,M.S.***, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
6. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
7. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2002 (Kelas Khusus), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswi hingga selesai.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum perdata (Kenotariatan) pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Maret 2005

Penulis,

Elizabeth Estiningsih, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tugas dan Kewenangan Notaris	13
2.1.1. Pengertian Notaris.....	13
2.1.2. Jabatan dan Kewenangan Notaris.....	14
2.2. Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia.....	17
2.2.1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).....	17
2.2.2. Kode Etik Notaris (KEN).....	18
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Etika Profesi.....	20
2.3.1. Pengertian Etika Profesi.....	20
2.3.2. Profesi Notaris.....	22
2.4. Pengertian Malpraktek.....	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan.....	30
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	31
3.3. Populasi dan Teknik Sampling.....	31
3.3.1. Populasi.....	31
3.3.2. Teknik Sampling.....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5. Metode Analisa Data.....	34
3.6. Lokasi Penelitian.....	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindakan Malpraktek Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Sehari-hari.....	36
4.1.1. Faktor-faktor Dari Peraturan-peraturan Hukum Yang	

Berlaku.....	43
4.1.2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Dari Pribadi Notaris itu Sendiri.....	44
4.1.3. Faktor Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Notaris	51
4.2. Konsekuensi Yuridisnya dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Mereka Melakukan Tindakan Malpraktek.....	57
4.3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Sehari-hari.....	73

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran-saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. Pendapat Notaris Terhadap Jenis Tindakan Malpraktek.....	41
II. Pendapat Notaris Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Malpraktek	42
III. Pendapat Notaris Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Bersumber Dari Diri Pribadi Notaris Yang Bersangkutan.....	46
IV. Pendapat Pengacara Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Bersumber Dari Diri Pribadi Notaris Yang Bersangkutan.....	48
V. Pendapat Hakim Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Bersumber Dari Diri Pribadi Notaris Yang Bersangkutan.....	49
VI. Pendapat Klien Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Bersumber Dari Diri Pribadi Notaris Yang Bersangkutan	50
VII. Pandangan Notaris Terhadap Fungsi Majelis Pengawas.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang berarti meliputi pembangunan materiel dan spiritual. Dalam pembangunan spritual termasuk pula pembangunan moral yang akan sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk pembangunan spiritual yang lain, misalnya di dalam pembangunan hukum nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak

dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu semakin kuat pula tuntutan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh notaris. Pelayanan yang diberikan oleh notaris bukan hanya sekedar dilakukan oleh mereka yang telah dididik dan menamatkan pelajarannya di pendidikan notariat serta menyelesaikan segala persyaratan pelatihan untuk diangkat menjadi seorang notaris, tetapi tidak bisa lepas dari para notaris tersebut memiliki kemampuan profesional dalam menjalankan tugas jabatannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya.

Apabila berbicara mengenai kemampuan profesional para notaris, mau tidak mau hal tersebut akan berbicara mengenai masalah pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat. Semakin meningkat kemampuan profesional para notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang mempunyai

fungsi mengatur hubungan hukum di antara para pihak secara tertulis dan otentik, akan semakin baik pula pelayanan jasa hukum yang akan diterima oleh masyarakat. Kemampuan profesional seseorang menunjukkan pada keahliannya yang didukung oleh penguasaan ilmu, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi. Walaupun seorang notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun demikian apabila dalam melaksanakan jabatannya tidak dilandasi integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka notaris tersebut bukan saja merugikan kepentingan masyarakat luas tetapi juga akan merusak nama baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesinya.

Bahwasanya orang yang profesional itu, lebih-lebih bagi yang menjalankan jabatan notaris harus mempunyai tanggung jawab :

- a. Kepada klien dan masyarakat ;
- b. Kepada sesama yang seprofesi dan kelompok profesinya atau organisasi perkumpulannya dan ;
- c. Kepada pemerintah dan negara atau secara hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi semakin meningkat pula kesadaran hukum warga masyarakat. Oleh karena itu perlu diikuti dengan penegakan disiplin dan penegakan hukum dilingkungan profesi. Hal demikian disebabkan karena stigma sosial terhadap profesi tidak hanya merugikan organisasi profesi, tetapi juga masyarakat, negara dan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hubungan ini peranan, fungsi dan tanggung jawab aparat hukum serta penyandang profesi di bidang hukum teramat besar dan penting guna menjaga dan menegakkan citra negara hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Oleh karena dengan adanya moral yang tinggi tersebut notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Sebagaimana harapan Komar Andasasmita, agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta ketrampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektifnya.¹

Guna memberikan landasan hukum dan ketaatan pada asas hukum dalam pembangunan nasional, maka para notaris memegang peranan yang sangat penting. Pada umumnya para pencari jasa notaris kurang memahami hukum dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada notaris untuk merumuskan keinginan antara mereka yang tentunya diharapkan dibuat sesuai dengan hukum.

Adanya arus modernisasi dan era globaliasi yang telah merambah ke negara kita membawa dampak bagi perkembangan lembaga-lembaga hukum baru dibidang perekonomian dan perdagangan, sehingga para notaris diharapkan dapat mengantisipasi situasi dan kondisi dari perkembangan tersebut serta mampu untuk membuat akta-akta yang memenuhi atau mengikuti kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di

1. Komar Andasasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jababatnya*, Sumur, Bandung, 1981, hal. 14.

masyarakat. Diharapkan dalam menjalankan tugasnya para notaris selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat dan keluhuran profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari di pengadilan.

Sangatlah disayangkan bilamana terdapat akta-akta notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya, akibat ulah oknum-oknum notaris yang kurang bertanggung jawab, karena ketidaksengajaannya atau karena kurang menguasainya dalam melaksanakan tugas jabatannya dan bertentangan dengan etika profesi notaris di mana hal ini dapat menjurus kepada tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris dapat berupa bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari menjalankan tugas dan tanggung jawab notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.²

Berkaitan dengan permasalahan malpraktek ada beberapa hal yang pernah terjadi dalam praktek kenotarisan di Indonesia antara lain :

² Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991, hal. 1.

1. Tuduhan pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris. Notaris dalam praktek sidang pengadilan didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat pada umumnya.
2. Notaris dalam praktek di sidang pengadilan yang dijadikan tergugat. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan yang secara sengaja dilakukan oleh notaris, tetapi juga karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya.³

Dalam beberapa contoh kasus malpraktek yang dilakukan oleh notaris, antara lain : “Pemalsuan Akta Otentik dan Penggunaan Akta Palsu” yang pernah terjadi pada notaris Lucy Mulyani yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tertanggal 5 Mei 1986 No. 90.Pid/B/1985 dan perkara tersebut sudah diputuskan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 20-7-1987 No. 274/Pid-B/1987 terhadap notaris Ria dalam kasus “Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Suatu Akta Otentik” dan kasus “Gugatan Pembatalan Akta” yang melibatkan Notaris Angelique Tedjajuwono sebagai pemegang protokol Notaris yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 197/Pdt.G/1986.

Semakin banyak juga terjadi pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh para notaris, khususnya pelanggaran wilayah kerja yakni dengan melakukan penandatanganan akta di luar wilayah kerjanya. Hal demikian akan sangat merugikan, bukan saja terhadap masyarakat di mana akta otentik yang dibuat oleh notaris yang

³ Nico, *Notaris dan Tanggung Jawab Pidana*, Jurnal Renvoi No. 4 Tahun Kedua, September 2004, hal. 35.

bersangkutan akan menjadi akta di bawah tangan (Pasal 41 UUDN) dan begitu juga kepada notaris itu sendiri yang merupakan satu-satunya pejabat umum yang mengeluarkan alat bukti sempurna berupa akta otentik, di mana dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut untuk selalu profesional. Untuk saat ini jumlah kasus yang terjadi baik di pengadilan maupun di kepolisian yang menyangkut dengan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sampai dengan bulan Juli 2003 saja untuk wilayah DKI Jakarta sudah mencapai 279 kasus, khusus yang berkaitan dengan akta-akta notaris.⁴

Di samping itu juga akibat penyebaran notaris yang tidak merata telah menyebabkan formasi notaris di beberapa daerah kota besar seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan telah dinyatakan tertutup untuk pengangkatan notaris-notaris baru, kecuali untuk notaris pindahan. Menurut data di bagian seksi notariat Departemen Hukum dan HAM jumlah notaris di seluruh Indonesia sebelum KepMen No. 05/1998 tentang pengangkatan notaris baru atau pindahnya notaris adalah kurang lebih 3000 orang, namun sekarang kemudian jumlah tersebut berjumlah secara amat spektakuler menjadi 6000 orang notaris. Masalah ini telah menyebabkan banyak notaris yang tergoda melakukan praktek persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris lainnya dengan cara “banting harga” walaupun sudah ada ketentuan dari masing-masing pengurus daerah (PENGDA INI) setempat mengenai biaya dari jenis akta yang akan dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan akibatnya akan meluas pada penyalagunaan wewenang atau penyimpangan tugas notaris yang meningkat kepada perbuatan melanggar hukum dalam bentuk kejahatan

⁴ Data dari Surat Terbuka PP INI di Jakarta Tanggal 28 Oktober 2003.

berdemensi baru yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas, hal tersebut diperkirakan karena jabatan notaris dianggap sebagai sumber untuk menggali kekayaan, di mana orang saat ini mulai mengejar dengan menempatkan integritas, nama baik dan martabat sebagai nomor dua dan notaris tidak luput dari gejala tersebut.⁵ Akhir-akhir ini profesi notaris telah mengalami krisis karena sering disoroti oleh masyarakat, sering adanya berita pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut, baik pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris). Undang-Undang Jabatan Notaris yang isi pasal-pasal nya lebih banyak mengatur dan memberikan sanksi-sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak juga menjadi suatu rambu-rambu peringatan bagi notaris dan di antara para notaris tersebut ada saja yang melanggarnya, permasalahannya faktor-faktor apa yang telah mendorong notaris tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti malpraktek.

Seharusnya notaris dalam melaksanakan tugasnya lebih cermat, obyektif dan benar serta selalu mengingat sumpah jabatan dan etika profesinya, selalu bertindak sesuai dengan keluhuran profesinya yang merupakan jabatan terhormat dan jabatan kepercayaan serta sebagai profesi yang mandiri harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 311.

Jabatan dan profesi notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan, jelas tidak terlepas dari peranan dan tanggung jawab yang besar. Seorang notaris harus senantiasa berusaha terus mendalami dan mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga mampu mengamalkan profesinya dengan dilandasi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu masyarakat menganggap profesi notaris dapat menyelesaikan segala masalah hukum.⁶

Dalam kaitannya notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu undang-undang memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada notaris dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab dibahunya baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Oleh karena tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah dan karenanya dapat dikatakan, bahwa tugas notaris adalah menjalankan pelayanan publik (*Public Service*) dibidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan padanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa notaris.

Fungsi seorang notaris bukan hanya sekedar mencatat dan membuat alat pembuktian mengenai perbuatan hukum para pihak tertentu saja, melainkan juga mengupayakan agar urusan yang dipercayakan kepadanya dapat berjalan sesuai dengan

⁶ Habib Adjie, *Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perpektif Pendekatan Sistem*, Media Notariat Ed. April - Juni, INI, Jakarta, 2002, hal. 6 – 7.

hukum yang berlaku. Walaupun dalam satu dan lain hal dapat saja dijumpai adanya seorang notaris yang melakukan suatu pelanggaran di dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu seorang notaris dituntut untuk selalu memelihara martabat dan kehormatannya, melaksanakan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari, selalu meningkatkan kemampuan dan menguasai produk-produk hukum yang baru guna peningkatan jasa pelayanan kenotariatan. Terkadang seorang notaris lupa, bahwa jabatan yang diembannya adalah jabatan profesi yang berbeda dengan pekerjaan profesi lainnya, karena disamping diatur oleh peraturan perundang-undangan notaris juga harus menjalankan standar etika profesinya.

Oleh karena itu pekerjaan notaris tidaklah gampang, bahkan sekarang dalam prakteknya banyak kita dengar notaris pun banyak yang digugat oleh kliennya. Gejala ini sebenarnya sudah menyalahi aturan yang berlaku, karena notaris dalam pekerjaannya masuk dalam hukum perdata, namun sering ditarik ke permasalahan hukum pidana. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut sangat merugikan terhadap diri notaris dalam kaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum. Oleh karenanya perlu dijamin adanya rasa aman dan tenang bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Hukum sebagai payung pelindung, seyogyanya memberikan perlindungan terhadap notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Sehubungan dengan uraian permasalahan tersebut di atas, penulis merasa perlu kiranya malpraktek yang terjadi di kalangan profesi notaris untuk diteliti dan dibahas ke dalam sebuah tesis dengan judul : **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TERJADINYA MALPRAKTEK.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan malpraktek terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridisnya dan tanggung jawab notaris apabila mereka melakukan tindakan malpraktek ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan notaris melakukan tindakan malpraktek.

2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis dan tanggung jawab yang akan diterima dan dilakukan notaris apabila terjadi tindakan malpraktek.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi profesi notaris dalam menjalankan tugas kesehariannya selaku pejabat umum, sehingga menghindari timbulnya tindakan malpraktek dalam melaksanakan tugas jabatannya.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya di bidang kenotariatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tugas dan Kewenangan Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Untuk dapat lebih memahami segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas dan kewenangan notaris maka akan diuraikan dan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang sosok notaris sebagai pejabat yang berwenang, membuat akta-akta otentik serta berbagai macam surat lainnya atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pengertian notaris dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUNJN), yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah :

Suatu akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat di mana akta itu dibuat.”

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut hanya menjelaskan tentang apa yang disebut akta otentik, sedangkan apa yang disebut pejabat umum tidak dijelaskan dan untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 1868 KUH Perdata itulah pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan yang menunjuk pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik itu, sebagaimana ketentuan yang

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai pejabat umum lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2)nya notaris diberi wewenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan mendaftarkan surat dibawah tangan, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

2.1.2. Jabatan dan Kewenangan Notaris

Mengenai jabatan notaris, A.G. Lubbers guru besar dalam ilmu notariat, menulis dalam kata pendahuluan buku *Het Notariaat* (1963) dalam Tan Thong Kie :⁷

Een niet spectaculer, doch daarom niet minder boeiend juridisch ambt.

Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :

Suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler (tidak amat menarik perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris Buku II*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 172.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 2 UUJN menyebutkan jabatan notaris dijalankan, orang yang khusus diangkat dan diberhentikan untuk itu oleh Menteri.

Dalam praktek saat ini tidak hanya dikenal yang dinamakan "Notaris" akan tetapi juga dikenal yang namanya "Notaris Pengganti". Adapun yang dinamakan notaris adalah apa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN tersebut, sedangkan notaris pengganti menurut Pasal 1 ayat (3) UUJN adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Umumnya banyak orang tidak membedakan hal tersebut.

Mengingat notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dalam jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi notaris yang bersangkutan, maka orang bersedia menyerahkan sesuatu kepercayaan kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*), notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan itu selain sudah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 322 KUHP juga demi kepentingan notaris itu sendiri.

Seperti pengacara, dokter dan pejabat agama, notaris pun sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kewajiban itu ada, terlepas dari mereka yang menyampaikan masalah itu membebankan secara tegas ataupun tidak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, notaris diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi oleh karena jabatannya atau

pekerjaannya harus merahasiakan, mempunyai hak ingkar artinya bisa minta dibebaskan memberikan kesaksian di depan hakim. Sikap untuk tidak berbicara di depan persidangan sebagai saksi yang dilakukan oleh seorang notaris, sejalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 UUN notaris mempunyai kewajiban, hak dan wewenang untuk mempertahankan sumpah dan jabatan, menjaga isi akta serapat-rapatnya, sehingga notaris merasa mempunyai hak ingkar terhadap segala akta dan apa yang tercantum dalam isi akta-aktanya itu dan bila membuka rahasia jabatan selain terancam sanksi dalam ketentuan UUN dapat pula dikenakan sanksi pidana hukuman penjara 9 bulan demikian ketentuan dalam Pasal 322 KUHP.

Selanjutnya tugas dan wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) UUN, notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :⁸

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum ;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang ;

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 48.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan jika akta itu ditanda tangani oleh para penghadap (Pasal 1869 KUH Perdata dan Pasal 39, Pasal 40 UUJN).

2.2. Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia

Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk itu, maka akan diuraikan dan dijelaskan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menjadi dasar hukum jabatan notaris di Indonesia.

2.2.1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 yang lalu adalah merupakan pengganti dari Notaris Reglement Stb. 1860 No. 3 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang sudah tidak sesuai

lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan hukum yang ada di masyarakat saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berlaku mulai pada tanggal diundangkannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris ini mengandung hukum materiil maupun hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 merupakan hukum materiil, demikian pula tentang pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya. Selain itu juga tidak kurang pentingnya adalah hukum formal karena untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang otentik, harus dipenuhi semua ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar sesuatu akta notaris mempunyai bentuk yang sah. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan itu dapat menyebabkan bahwa akta itu kehilangan sifat otentiknya, sehingga dapat mengakibatkan akta tersebut menjadi batal.

2.2.2. Kode Etik Notaris (KEN)

Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian dari wewenang pemerintah, maka dari diri seorang notaris dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih daripada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya.

Mengenai hal ini tentunya diperlukan suatu tolak ukur yang utama bagi sikap dan watak dari seorang notaris dan tolak ukur tersebut termuat dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan atau pedoman moral/kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat

umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut :⁹

- 1 Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi ;
- 2 Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi ;
- 3 Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi ;
- 4 Konsultasi dan praktek pribadi ;
- 5 Tingkat kemampuan/kompentensi yang umum ;
- 6 Administrasi personalia ;
- 7 Standar-standar untuk pelatihan.

Namun demikian diutarakan, bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Hal ini dapat terjadi disebabkan perbedaan tugas dan peranan profesi tersebut dalam menjalankan profesinya di masyarakat.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan suatu organisasi profesi, dalam kongresnya yang ke IX di Surabaya dari tanggal 13 sampai dengan 16 Nopember 1974 telah mengambil keputusan untuk menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Notaris, kemudian diubah dan disusun kembali dalam kongres INI ke XIII di Bandung tahun 1987 dan kongres INI ke XIV di Denpasar Bali tahun 1990.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 13.

Sejak tahun 1987 oleh Departemen Kehakiman sekarang Departemen Hukum dan HAM disyaratkan, bahwa seseorang untuk dapat diangkat sebagai notaris selain harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dapat membuktikan pula bahwa ia telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh INI berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM kepada INI.

Pada dasarnya rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan bagi para notaris telah diatur secara hukum dalam UUJN lengkap dengan sanksinya, adapun kode etik yang disusun oleh organisasi profesi (INI) yang ada sekarang merupakan penambahan dari UUJN tersebut dan semata-mata sebagai penjabaran atau penjelasan tambahan dari ketentuan UUJN.

Kode etik adalah norma-norma atau peraturan-peraturan mengenai etika baik tertulis maupun tidak tertulis. Khusus bagi para notaris tentang etika telah diatur dalam UUJN, namun untuk mengetahui ketentuan mana yang ada dalam UUJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik kiranya perlu ada penafsiran tersebut, agar dapat diketahui dengan jelas hukuman-hukuman dalam arti tehnik dari KUHP yang merupakan hukuman pidana dan merupakan hukuman disipliner dari ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 dari UUJN.

2.3. Tinjauan Umum Mengenai Etika Profesi

2.3.1. Pengertian Etika Profesi

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti kebiasaan, perilaku atau kelakuan. Etika adalah ilmu pengetahuan filsafat tentang perilaku

manusia dapat disebut ilmu kesusilaan atau ilmu akhlak, jadi menyangkut moral. Dengan kata lain etika bertalian dengan sesuatu yang terdapat dalam jasmani dan rohani manusia, sehingga merupakan suatu hal atau bidang yang berkaitan erat baik dengan falsafah atau filsafat maupun praktek kehidupan manusia sehari-hari.

Kata etika dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam arti luas etika adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya seseorang berbuat agar dapat memenuhi norma-norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan pengertian etika dalam arti sempit adalah sistem norma-norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya etika dapat dipersempit lagi menurut masing-masing bidang, sehingga ada yang disebut sebagai etika pergaulan, etika profesi dan sebagainya.

Menurut Komar Andasmita, etika itu bukan hukum dan sebaliknya hukum bukanlah etika walaupun dimaklumi bahwa tidak sedikit eksistensi hukum itu berlatar belakang atau berdasarkan etika. Oleh karena itu terhadap pelanggaran etika tidak ada sanksinya, lain halnya terhadap hukum.¹⁰

Selanjutnya C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menambahkan, bahwa untuk menegakkan etika setiap profesi memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam Kode Etik Profesi dari profesi yang bersangkutan.¹¹

Untuk menjaga kelangsungan hidup profesi yang bersangkutan sudah tentu penegakkan etika profesi tersebut sangat penting, jika organisasi profesi tidak mampu

¹⁰ Komar Andasmita, *Op.cit*, hal. 20.

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 5.

menegakkan etika profesi untuk para anggotanya maka secara tidak langsung akan berpengaruh dalam sistem hukum nasional yang artinya bahwa notaris pun menjalankan substansi hukum nasional dalam bidang tertentu. Bagaimana hukum nasional akan berjalan dengan baik jika ada sub-sub sistemnya tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam sub-sub sistem tersebut.

Bahwa penegakan etika profesi tersebut sangat penting jika dikaitkan dengan globalisasi perdagangan dunia, salah satu yang dapat diperdagangkan secara terbuka, yaitu masalah jasa hukum, bagaimana suatu profesi akan dapat bersaing dan dihargai oleh profesi lainnya jika tidak dilakukan penegakan yang tegas kepada para anggota yang melanggar kode etik profesi.

2.3.2. Profesi Notaris

Pasal 1 ayat (1) UUDN mengemukakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara bekerja juga untuk kepentingan negara, namun notaris bukanlah “pegawai” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebab notaris tidak menerima gaji, notaris hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah, tapi notaris dipensiunkan oleh pemerintah akan tetapi juga tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Fungsi dan peran notaris dalam pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks, semakin luas dan berkembang, sehingga hal ini tidak terlepas juga dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan notaris. Dalam melaksanakan tugasnya notaris harus selalu berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme notaris akan hilang. Jabatan notaris selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh terutama dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya kepada masyarakat. Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Dalam menjalankan tugasnya notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak memihak dan penuh rasa tanggung jawab serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Profesi notaris termasuk ke dalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur seperti yang dimaksud oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, yaitu suatu profesi yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia yaitu masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.¹²

¹² *Ibid.* hal. 5.

2.4. Pengertian Malpraktek

Istilah malpraktek digunakan kalangan profesi untuk menggambarkan kelalaian, penyimpangan, kesalahan atau ketidakmampuan praktek profesi sesuai dengan standar yang berakibat merugikan konsumen.

Penggunaan istilah malpraktek kini sudah meluas diberbagai bidang disiplin ilmu, termasuk dalam bidang kenotariatan. Profesi yang melakukan malpraktek dapat terjadi pada profesi di bidang kedokteran, hukum, ekonomi, teknik dan sebagainya. Malpraktek berasal dari istilah “*malpractice*” yang oleh Coughlin dalam Soerjono Soekanto dan Herkutanto malpraktek dirumuskan sebagai berikut :

*Professional misconduct on the part of a professional person, such as a physician, engineer, lawyer, accountant, dentist, or veterinaria. Malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties, intentional wrongdoing, or legal or unethical practice.*¹³

Sedangkan menurut John M. Echols dan Hasan Shadily dalam Kamus Inggris Indonesia, “*malpractice*” diartikan sebagai tindakan salah.

Dari definisi-definisi tersebut di atas malpraktek dapatlah diartikan sebagai bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesional atau didasarkan kepada kepercayaan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad, malpraktek dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori menurut bidang tata hukum, misalnya menurut bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987, hal. 153.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad, *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pres, Jakarta, 1983, hal. 68.

Meskipun kini masalah malpraktek banyak dibicarakan dan dipermasalahkan, namun pengertian tentang istilah tersebut masih kabur dan sering disalahtafsirkan. Selanjutnya kerancuan pemahaman tersebut tidak jarang menyebabkan pandangan yang mencampuradukan etika profesi dengan norma-norma hukum yang ada. Kerancuan tersebut tidak saja menyebabkan timbulnya kesenjangan antara para pengemban profesi hukum dengan masyarakat yang dilayaninya, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dan dilema tersendiri bagi pengemban profesi hukum dalam melaksanakan jabatannya.

Permasalahan tindakan malpraktek ini mempunyai kaitan dengan hukum pidana dan hukum perdata, selain itu tampak pula adanya hubungan antar etika profesi dengan soal hukum dan segala akibat hukum yang timbul karenanya. Soal malpraktek adalah suatu istilah hukum, pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat diajukan ke pengadilan pada hakim pidana ataupun hakim perdata ataupun dapat dihadapkan dengan tindakan administratif oleh badan non judikatif.

Tanggung jawab berdasarkan atas hukum perdata dapat mengakibatkan adanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris dan selanjutnya notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Pemberhentian sementara ;
- d. Pemberhentian dengan hormat atau ;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Malpraktek yang dilakukan oleh notaris baik di dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, tidaklah diberikan penjelasan atau pengertian secara jelas. Namun ruang lingkup malpraktek yang dilakukan oleh notaris mencakup bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari tugas dan tanggung jawab notaris, baik karena kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan kewajiban-kewajiban profesional atau yang didasarkan kepada kepercayaan.¹⁵

Lebih jauh mengenai malpraktek ini bila dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikemukakan bahwa para notaris menurut Pasal 37, 54, 84 dan Pasal 85 UUJN diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang berkepentingan sebagai akibat kekeliruan notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, selain membayar atau mengganti kerugian para notaris juga diwajibkan membayar denda, bahkan dapat terancam pemecatan dari jabatan bila pelanggaran yang dilakukan terjadi secara berulang.

Kelalaian terhadap tugas profesi seperti secara alpa dapat menyalahgunakan kewenangannya antara lain dengan cara menyelenggarakan industri akta di mana menurut ketentuan Pasal 44 UUJN setiap akta notaris harus dibacakan oleh notaris sendiri. Hal ini cenderung menumbuhkan terjadinya tindakan malpraktek notaris, karena hal tersebut tidak mungkin dapat dikendalikan oleh kualitas standar profesi.

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit*, hal. 19.

Menurut Tan Thong Kie harus diakui, bahwa pembacaan akta di Jakarta sudah umum tidak dilakukan lagi oleh notaris, tetapi dibacakan oleh asisten notaris bahkan sama sekali ada yang tidak dibacakan.¹⁶

Penyimpangan tugas profesi notaris karena kelalaiannya dapat digolongkan ke dalam melakukan perbuatan malpraktek baik dalam lingkup malpraktek karena melanggar etika profesi notaris (*ethical malpractice*) maupun melanggar hukum profesi notaris (*legal malpractice*).

Selain itu kualifikasi melakukan perbuatan tercela oleh profesi notaris dapat berwujud perbuatan yang bersifat "*materiele wederrechelijk*" atau bersifat melawan hukum tidak tertulis. Apabila terjadi malpraktek dari tugas profesi notaris dari sudut perilaku profesi akan berwujud :

1. Melakukan penyimpangan tugas profesi atau kurang kemampuan menjalankan tugas profesi karena kesalahannya yang bersifat lalai ;
2. Terjadi suatu ketidakseimbangan antara nilai atau kaedah profesi dan perilaku profesi di dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.¹⁷

Kerusakan yang diakibatkan oleh malpraktek akan menyebabkan kerugian pada :

1. Klien ;
2. Ikatan profesi (INI);
3. Negara dalam artian penegakan hukum ;
4. Notaris itu sendiri.¹⁸

¹⁶ Tan Thong Kie, *Op.cit*, hal. 261.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktek dan Kejahatan Kera Putih*, Ceramah Umum pada Kongres XVII INI, Jakarta, 1999, hal. 7-8.

¹⁸ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit*, hal. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Graind Persada, Jakarta, 2003, hal. 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²¹ Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.²²

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.²³

Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.²⁴ Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, hal. 4.

²² Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 42.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 9.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana dikemukakan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam hubungan dengan terjadinya tindakan malpraktek dalam menjalankan tugas jabatannya.

Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek pelaksanaan kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam hubungannya dengan terjadinya malpraktek baik dari segi teori maupun praktek beserta upaya-upaya penyelesaiannya apabila terjadi.

3.3. Populasi dan Teknik Sampling

3.3.1. Populasi

Penelitian selalu berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut populasi dan sampel penelitian. Secara singkat populasi dapat dikatakan sebagai :

- sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian dan elemen populasi itu merupakan satuan analisis ;
- sekelompok obyek baik manusia, gejala, nilai tes, benda atau peristiwa ;
- jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. ²⁶

²⁶ Hernawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian (Buku Panduan Mahasiswa)*, APTIK, Jakarta, 1990, hal. 52.

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²⁵

3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ilmiah dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Jadi pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari, khususnya dalam hubungan dengan terjadinya tindakan malpraktek.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hal. 36.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh obyek atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁷

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu peristiwa.²⁸ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasinya adalah seluruh notaris yang ada di Propinsi Jawa Tengah, mereka dipilih berdasarkan masa prakteknya yakni dibawah 5 (lima) tahun dan di atas 10 (sepuluh) tahun, kemudian dari jumlah keseluruhan notaris yang ada hanya sebanyak 20 (dua puluh) orang notaris saja yang dijadikan sampel. Demikian juga dengan responden pengacara, hakim dan klien dalam penelitian ini mereka dipilih berdasarkan kriteria mereka yang pernah menangani atau mengalami tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris.

3.3.2. Teknik Sampling

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), artinya penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Oleh karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Pertimbangan mereka ditunjuk atau dipilih sebagai subyek responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalani praktek profesi notaris baik sebagai notaris junior maupun sebagai notaris

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 44.

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal. 94.

senior serta adanya kesamaan dalam bidang profesi, sehingga sampel yang diambil tidak perlu dalam jumlah besar.

Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. 20 orang Notaris ;
2. 5 orang Hakim ;
3. 5 orang Pengacara dan ;
4. 10 orang Klien.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang bersifat obyektif dilakukan pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam membahas serta menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini data tersebut meliputi :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui *interview* / wawancara.

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian lapangan, penulis melakukan dengan cara wawancara.

Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa notaris, hakim, pengacara dan klien yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Wawancara ini berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan dan majalah-majalah yang ada kaitannya dengan masalah tindakan malpraktek terhadap profesi notaris.

3.5. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, yaitu dengan menginventarisasi data-data yang terkumpul dan kemudian di seleksi untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori, sehingga memberikan gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan/responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa kantor notaris yang berkedudukan di Kota Semarang. Dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang yang sangat dekat dengan daerah kawasan industri dan pusat transaksi bisnis daerah Propinsi Jawa Tengah, tentunya banyak dan bermacam bentuk akta yang dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan atau melibatkan jasa profesi notaris dalam pembuatan akta sehubungan dengan transaksi atau perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus tentang kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam hubungannya dengan terjadinya tindakan malpraktek. Pembahasan bertitik tolak dari temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta yang terkumpul dan terlihat sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.

Hasil penelitian lapangan sangat diperlukan guna menjawab permasalahan yang diajukan pada Bab I, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan tersebut akan didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Oleh karena itu, bab ini secara berturut-turut akan dibagi dalam 3 Sub bagian, yaitu :

1. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan malpraktek terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari.
2. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsekuensi yuridisnya dan tanggung jawab notaris apabila mereka melakukan tindakan malpraktek.
3. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari.

4.1. Faktor-faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindakan Malpraktek Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Sehari-hari.

Pelaksanaan profesi yang benar mewajibkan setiap notaris untuk menghindarkan diri dalam pekerjaan dan perilakunya terhadap setiap jenis persaingan yang tidak sehat, disamping itu juga harus menghormati yurisdiksi sesama rekan notaris lainnya, menghindari penurunan biaya pembuatan akta yang telah ditentukan, periklanan pribadi dan lain sebagainya, bila hal tersebut dilanggar tentunya akan merusak citra dan prestise yang seyogyanya diperoleh oleh notaris bersangkutan.

Akan tetapi melayani dunia bisnis yang sering dipandang lebih lugas dan personal, etika profesi hukum yang melandasi moral perilaku para notaris seringkali menghadapi gangguan dan godaan yang lebih berat dan menguji. Tekanan dan tuntutan agar kliennya yang terkadang mempunyai aturan permainan sendiri sering terjadi dalam praktek.

Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembang pula kebutuhan hukum yang semakin rumit dan terkadang memerlukan penanganan oleh profesi yang sesuai dengan bidangnya, yaitu dengan tuntutan persyaratan keahlian dan keterampilan yang lebih berat, dengan kata lain tuntutan persyaratan bagi profesi notaris semakin berat pula.

Walaupun persyaratan keahlian dan keterampilan yang dituntut dari para notaris dalam menghadapi perkembangan zaman telah semakin berat, namun dalam dunia notariat pada khususnya dan dunia hukum pada umumnya, diakui bahwa selain persyaratan tersebut yang telah diatur dengan jelas dalam undang-undangnya masih terdapat persyaratan lainnya yang dapat dikatakan sama pentingnya, yaitu persyaratan

kepribadian dari notaris yang bersangkutan yang harus berlandaskan sikap dan posisi mandiri serta tidak memihak kepada siapapun juga. Dasar dari profesi notaris sesungguhnya adalah kepribadian notaris yang dilandasi oleh sikap bebas atau mandiri yang harus memberi pendapat didasarkan pada pendapat dan pengetahuan yang jujur sesuai dengan apa yang benar menurut hati nuraninya tanpa terpengaruh pada kehendak pribadi dari salah satu pihak yang bersangkutan walaupun pihak tersebut adalah pihak yang menunjuk dan membayar honorarium notaris tersebut.

Oleh karena itu diharapkan agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam disamping keterampilan seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga para notaris dapat benar-benar nantinya merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik yang mereka kehendaki. Demi tercapainya harapan tersebut, maka setiap orang yang diangkat sebagai notaris harus melalui pendidikan yang cukup dan memenuhi berbagai persyaratan pelatihan yang telah ditentukan baik yang telah diatur dalam UUJN itu sendiri maupun peraturan tambahan lainnya.

Persaingan yang terjadi dilingkungan profesi notaris harus sehat, tetap menegakkan etika profesi di mana terselenggaranya pelayanan yang lebih baik dan memadai dengan tingkat honorarium yang wajar dan ini akan mendorong peningkatan profesionalisme dan mencegah terjadinya tindakan malpraktek dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari.

Krisis mengenai profesi notaris ini diawali oleh kebijakan Muladi yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, yakni pada tahun 1998 yang telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.05.HT.03.10

tanggal 26 Juli 1998 yang membuka kesempatan untuk diangkatnya notaris baru atau pindahnya notaris dari suatu daerah ke daerah lain tanpa mempertimbangkan kriteria-kriteria baku yang sebelumnya menjadi kebijakan di Departemen Hukum dan HAM saat itu, yakni formasi notaris.

Akibat kebijakan tersebut telah terjadi pengangkatan dan perpindahan wilayah kerja notaris, yakni pengangkatan terhadap 2331 kandidat notaris dan menyatakan tetap tersedia formasi bagi pengangkatan notaris baru dan akibatnya telah memberi dampak yang luas pada profesi notaris, padahal dalam menghadapi era globalisasi para notaris sedang mencoba menentukan kedudukan fungsi dan peranannya. Kebijakan tersebut telah berdampak menimbulkan persaingan yang tidak sehat dikalangan profesi notaris itu sendiri, yang tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjurus kepada tindakan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya, yakni berupa tindakan malpraktek.

Kebijakan pengangkatan secara massal yang telah menjadi permasalahan besar bagi lembaga notariat ini telah dicabut dengan Keputusan Menteri No.M.01.H.T.03.01 Tahun 2003 yang telah mengembalikan pembinaan kenotariatan kepada sistem yang lama berbasis formasi notaris. Keputusan ini dikeluarkan dengan maksud agar terjadi pemerataan notaris di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain jumlah notaris tidak hanya terpusat di daerah perkotaan saja.

Dalam Undang-Undang No.30 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 22 disebutkan :

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan :
 - a. kegiatan dunia usaha
 - b. jumlah penduduk; dan/atau

- c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang yang jumlah formasi notarisnya sudah melebihi mengakibatkan banyak kantor notaris yang tidak melakukan aktifitas profesinya yang dikarenakan sepi tidak mendapatkan pekerjaan. Dampak dari jumlah notaris yang tak terkendali pengangkatannya pada suatu daerah dapat merupakan hal yang menjadi pendorong terjadinya pelanggaran berupa persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris itu sendiri. Akhirnya notaris yang profesional akan tersisih dan muncullah penggantinya yang melahirkan notaris-notaris yang sering melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya. Walaupun telah ada ketentuan mengenai formasi notaris pada setiap daerah, namun ternyata ketentuan tersebut seringkali berubah-ubah menurut kebijakan dari setiap menteri yang menjabat dari pemerintahan yang berkuasa.²⁹

Ketentuan tentang adanya daerah tertutup bagi pengangkatan notaris baru merupakan salah satu usaha guna mewujudkan kehidupan notaris yang lebih baik, yang merupakan salah satu cara agar adanya pemerataan penempatan notaris hingga ke daerah-daerah dan tidak terkumpul hanya di kota-kota besar saja, setidaknya dapat membantu meningkatkan kualitas notaris terutama di kota-kota besar serta membatasi jumlah pendaftar yang melampaui kemampuan formasi untuk diangkat. Namun pada kenyataannya, daerah yang seharusnya formasi notarisnya sudah tidak memungkinkan

²⁹ Suyanto, selaku Ketua Pengda INI Jawa Tengah, Wawancara pada tanggal 14 Desember 2004.

untuk pengangkatan notaris baru masih saja ada pengangkatan dan penempatannya di daerah tersebut, terlebih lagi bagi notaris pindahan.

Selanjutnya menurut Sudono Iswahyudi,³⁰ selaku Jampidsus pada Kejaksaan Agung telah ditemukan sejumlah perbuatan-perbuatan tak terpuji dalam praktek-praktek notaris. Di antaranya notaris tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya. Praktek ini jelas telah melanggar UUJN, bahkan akta yang dibuat dihadapan notaris pun bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan. Kemudian notaris telah melanggar sumpahnya, menambah kesalahan dengan kebohongan karena menyebutkan dalam akta "telah menghadap sendiri di hadapan saya, notaris, para menghadap..." padahal mereka menghadap pada asisten. "setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris..." padahal akta tersebut dibacakan oleh asisten atau tidak dibaca sama sekali..." Dengan terjadinya praktek notaris secara demikian, maka notaris tidak hanya melanggar sumpahnya tetapi dengan sengaja telah membuat akta palsu. Praktek notaris yang demikian jelas sudah merupakan tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana yang dapat diajukan ke Pengadilan, namun dalam kenyataannya adalah sangat sulit dilakukan karena pada umumnya orang yang membutuhkan jasa notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh nampak bahwa ada beragam tindakan malpraktek yang dapat dilakukan oleh seorang notaris, sebagian besar di antaranya seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

³⁰ Sudono Iswahyudi, *Hak Ingkar Notaris Tak Berlaku Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Renvoi No. 1.13.II, Edisi 1 Tahun Kedua, 2004, hal. 52.

Tabel 1
Jenis Tindakan Malpraktek (n=20)

No.	Jenis Tindakan Malpraktek	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Tidak membacakan akta	4	20
2.	Tidak bertandatangan dihadapan notaris	2	10
3.	Penurunan tarif/biaya	8	40
4.	Industri akta	2	10
5.	Berada di luar wilayah kerja	1	5
6.	Menggunakan jasa perantara	2	10
7.	Membuka kantor cabang	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden yang telah diolah pada Tanggal 13-15 Desember 2004.

Hasil pendapat responden yang telah diwawancarai, menyatakan bahwa tindakan malpraktek yang paling banyak dilakukan oleh seorang notaris ialah adanya penurunan tarif atau biaya pada akta-akta yang mereka buat. Hal ini cukup beralasan mengingat jumlah notaris sekarang ini yang kian hari kian meningkat jumlahnya, sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat di antara sesama rekan notaris itu sendiri. Penurunan tarif atau biaya tersebut dilakukan agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah dibandingkan rekan notaris lainnya. Umumnya tindakan ini dilakukan oleh seorang notaris yang baru membuka praktek, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya tindakan inipun dilakukan oleh notaris yang sudah lama menjabat karena kekhawatiran tidak akan memperoleh pekerjaan.³¹

Masalah lain yang perlu kiranya mendapat perhatian ialah, bahwa saat ini kita dihadapkan pada suatu situasi dan kondisi di mana ternyata sekarang ini notaris sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk membacakan aktanya sekaligus juga berarti penandatanganan sudah tidak lagi dilakukan dihadapan notaris yang bersangkutan.

³¹ Hasil wawancara dengan para Notaris yang telah diolah pada Tanggal 13-15 Desember 2004.

Umumnya hal tersebut dilakukan oleh notaris yang tinggal di kota-kota besar dengan klien yang jumlahnya sudah banyak.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis keadaan seperti itu dapat terjadi karena yang bersangkutan mengejar target perolehan akta yang besar jumlahnya seperti industri akta, disamping keadaan lain seperti keterbatasan waktu, banyaknya klien lain yang menunggu dan sebagainya, dengan kata lain timbulnya industri akta dengan jumlah akta yang banyak setiap bulannya menyebabkan notaris melakukan hal tersebut.

Bila dilihat beragamnya tindakan malpraktek tersebut dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya tindakan tersebut, maka penulis menganalisa jawaban-jawaban yang dilakukan oleh para responden sesuai dengan pengetahuan mereka tentang UUJN, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan bidang kerja notaris seperti yang nampak pada tabel di bawah ini.

Tabel II
Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Malpraktek (n=20)

No.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Malpraktek	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Peraturan-peraturan hukum yang berlaku	2	10
2.	Sumber daya manusia (SDM)	12	60
3.	Pengawasan terhadap notaris	6	30
	Jumlah	20	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden yang telah diolah pada Tanggal 13-15 Desember 2004.

Untuk jelasnya faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya tindakan malpraktek oleh notaris akan diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Faktor-faktor Dari Peraturan-peraturan Hukum Yang Berlaku.

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa dari faktor peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek dari diri notaris yang bersangkutan hanya 2 (dua) orang notaris saja yang memberi tanggapannya. Adalah wajar apabila pada reformasi disegala bidang yang sedang digalakkan oleh pemerintah, termasuk reformasi di segala bidang hukum yang sedang berjalan ini memasukkan pembaharuan di bidang notariat guna mengantisipasi era globalisasi dan pasar bebas yang akan datang, disamping itu juga Peraturan Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tahun 1860 berdasarkan Stb. No. 3 yang merupakan produk hukum kolonial mengatur tentang profesi notaris yang berlaku selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada di masyarakat, secara tidak langsung sangat berpengaruh pada suatu tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris. Ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan sanksi, denda dan hukuman lainnya yang dirasakan oleh para notaris sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada.

Kemajuan di berbagai bidang kehidupan juga antara lain karena secara umum suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu diharapkan notaris selalu dapat mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang terjadi dan berlaku.

Selanjutnya untuk lebih memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas bagi profesi notaris yang selama ini masih memakai peraturan zaman kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, pemerintah telah menyetujui disahkannya RUU Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Jabatan

Notaris (yang disingkat UUN) dengan Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 yang lalu, terdiri dari 92 pasal di mana di antaranya mengandung ketentuan-ketentuan hukuman. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan sendirinya bersifat memaksa karena termasuk hukum publik. Dengan berlakunya UUN tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan payung pelindung hukum bagi profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari agar terhindar atau tidak melakukan tindakan yang merendahkan keluhuran dan martabat jabatannya.

4.1.2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Dari Pribadi Notaris Itu Sendiri.

Sikap yang sangat penting dari seorang notaris adalah sikap tidak memihak, di mana notaris dituntut agar memberikan akses terhadap informasi yang seimbang di antara para pihak yang membuat perjanjian, sehingga harus dicegah terjebaknya salah satu pihak ke dalam suatu perjanjian karena tidak tahu atau kurang dipahaminya persyaratan dari perjanjian yang sesungguhnya dapat merugikan pihak yang tidak cukup memahami persyaratan dari perjanjian tersebut.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka dipegang teguhnya sikap kemandirian tersebut menimbulkan kepercayaan masyarakat pada profesi notaris sebagai abdi masyarakat. Diabaikannya unsur persamaan akses atas informasi dapat menyebabkan akta notaris rentan terhadap resiko pembatalan dari akta atau perjanjian yang bersangkutan oleh hakim.

Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini ialah kualitas sumber daya manusia dari seorang notaris. Oleh karena itu proses menggugat peranan diri adalah langkah awal yang baik untuk memanifestasikan peranan sesungguhnya.

Profesionalisme, kemandirian dan orientasi ke depan adalah tuntutan jiwa seorang notaris. Melalui semangat berpikir demikian, notaris dapat membaca permasalahan yang ada disekitarnya. Untuk itulah kiranya peranan pendidikan notariat perlu diketengahkan, karena sebagai lembaga yang mendidik para kandidat-kandidat profesi notaris untuk masa-masa yang akan datang. Perencanaan pendidikan notariat perlu disusun berdasarkan perkiraan kebutuhan, baik dan segi jumlah maupun kemampuan. Hendaklah diadakan seleksi yang cukup ketat bagi penerimaan calon mahasiswa notariat. Badan kerjasama penyelenggara program pendidikan notariat perlu didorong agar dapat menyusun program yang seragam, disamping tuntutan bagi staf pengajarnya itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan edukatifnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada kenyataannya banyak mahasiswa notariat yang tujuan utamanya adalah agar cepat lulus (sekali pun dengan cara apapun juga) dan secepatnya memperoleh pengangkatan sebagai notaris dengan anggapan tugas notaris hanyalah menuliskan apa yang dikehendaki para pihak ke dalam suatu akta tanpa perlu mengeluarkan pikiran.

Jika ditelusuri hasil pendidikan notariat di berbagai universitas menunjukkan jumlah lulusan yang melebihi alokasi penempatan notaris dengan ratio wilayah kepadatan penduduk bagi urusan pembuatan akta notariel ternyata menimbulkan masalah, yakni tumbuhnya persaingan yang tidak sehat di antara sesama notaris itu sendiri dan meluas kepada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan tugas kepercayaan sebagai perbuatan tercela yang meningkat kepada perbuatan melanggar hukum.

Pada umumnya responden menyatakan, bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris dapat terjadi dari diri pribadi notaris yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pribadi dari diri notaris yang bersangkutan sendirilah yang menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek tersebut. Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa faktor utama atau yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek adalah sumber daya manusia dari diri pribadi notaris yang bersangkutan, yakni sebanyak 12 (dua belas) orang. Penilaian komentar dari para notaris, yaitu bahwa sumber daya manusia yang dimaksud adalah seperti moral dan integritas yang rendah/buruk dari diri pribadi notaris yang bersangkutan, disusul dengan adanya tuntutan ekonomi atau kesejahteraan dan hambatan lain berupa keterbatasan kemampuan dari diri pribadi notaris yang bersangkutan.

Keterbatasan kemampuan maksudnya tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada, lalai, ceroboh/kurang berhati-hati. Moral dan integritas rendah adalah moral dan hati nurani yang buruk/tidak baik dan tuntutan ekonomi atau kesejahteraan, yakni ingin memperoleh lebih banyak penghasilan.³²

Tabel III
Malpraktek yang Bersumber Dari Diri
Pribadi Notaris yang Bersangkutan (n=20)

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Keterbatasan Kemampuan	2	10
2.	Moral dan integritas yang rendah (buruk)	10	50
3.	Tuntutan ekonomi/kesejahteraan	8	40
	Jumlah	20	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden Notaris yang telah diolah pada Tanggal 13-dan 15-12-2004.

³² Hasil wawancara dengan para Notaris yang telah diolah pada Tanggal 13-15 Desember 2004.

Dari 20 (dua puluh) orang notaris yang menjadi responden diwawancarai sebanyak 10 (sepuluh) orang menyatakan, bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris dikarenakan oleh adanya moral dan integritas yang rendah/buruk yang dapat mempengaruhi dilakukannya tindakan malpraktek tersebut. Hal tersebut dilandasi pemikiran bahwa seorang notaris yang baik adalah notaris yang mempunyai moral dan integritas yang baik pula artinya dilandasi oleh sikap profesional yang tinggi yang mendasarinya untuk tidak merusak citra baiknya sebagai suatu profesi kepercayaan masyarakat.

Adapun alasan faktor ekonomi atau kesejahteraan hanya dikomentari oleh 8 (delapan) orang responden, dengan pertimbangan sebagai kelangsungan kebutuhan hidup terutama bagi notaris pria sebagai pribadi yang menunjang kebutuhan hidup keluarganya. Namun hal ini juga perlu penjelasan lebih lanjut mengingat bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang notaris yang kemudian praktek menjalankan jabatannya diperlukan suatu modal yang tidak sedikit jumlahnya, di mana hal ini diartikan oleh para responden bahwa pada dasarnya notaris adalah orang dari golongan menengah keatas. Menurut para responden seorang yang berpraktek menjadi notaris setidaknya sudah mempunyai bekal sejumlah modal tertentu untuk dapat tetap eksis dalam menjalankan jabatannya tersebut dengan kata lain tentunya hal ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya memang sudah mempunyai persiapan ke arah itu. Jikalau tindakan selanjutnya mengarah kepada pelanggaran berupa malpraktek, hal itu dikarenakan agar notaris yang bersangkutan ingin tetap eksis dan dikarenakan hal dalam diri manusia yang memang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia dapatkan dan terus ingin mencapai sesuatu yang lebih baik lagi.

Selanjutnya ada 2 (dua) orang responden, menyatakan bahwa adanya keterbatasan kemampuan dari diri pribadi notaris yang bersangkutan bukanlah merupakan alasan yang mendasar untuk dapat terjadinya tindakan malpraktek dengan pertimbangan bahwa dengan diangkatnya seseorang menjadi notaris, maka ia telah melewati berbagai jenjang pendidikan dan persyaratan-persyaratan tertentu yang berkaitan dengan ruang lingkup jabatannya tersebut. Mereka telah melewati fase-fase tersebut, tidak ada alasan bagi seorang notaris untuk tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan jabatannya tersebut. Akan tetapi ada juga responden mengomentari bahwa tindakan malpraktek dapat terjadi bila notaris yang bersangkutan lalai, kurang hati-hati dan dikarenakan ketidaktahuan notaris pada peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ada, misalnya hal tersebut dapat terjadi pada notaris yang berpraktek di tempat tertentu yang letaknya jauh dari pusat kota sehingga ia tertinggal jauh untuk mendapatkan informasi yang ada.

Selanjutnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa orang pengacara, dapat diperoleh ada beragam tindakan malpraktek yang dapat dilakukan oleh seorang notaris, sebagian besar berpendapat di antaranya seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV
Malpraktek yang Bersumber Dari Diri
Pribadi Notaris yang Bersangkutan (n=5)

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Keterbatasan Kemampuan	-	0
2.	Moral dan integritas yang rendah (buruk)	1	5
3.	Tuntutan ekonomi/kesejahteraan	4	95
	Jumlah	5	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden pengacara yang telah diolah pada Tanggal 16-dan 17-12-2004.

Dari kelompok responden pengacara menganggap bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan dapat dijadikan alasan sebagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek tersebut tidak ada seorang pengacarapun beranggapan demikian. Sedangkan adanya moral dan integritas yang rendah/buruk dalam diri pribadi notaris yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) orang yang selanjutnya lebih banyak memberi tanggapan mengarah kepada tujuan utamanya yaitu pemenuhan tuntutan ekonomi atau kesejahteraan, yakni sebanyak 4 (empat) orang.³³

Sedangkan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap beberapa orang hakim, dapat diperoleh ada beragam tindakan malpraktek juga yang dapat dilakukan oleh seorang notaris, sebagian besar di antaranya seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel V
Malpraktek yang Bersumber Dari
Diri Pribadi Notaris yang Bersangkutan (n=5)

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Keterbatasan Kemampuan	2	45
2.	Moral dan integritas yang rendah (buruk)	1	10
3.	Tuntutan ekonomi/kesejahteraan	2	45
	Jumlah	5	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden Hakim yang telah diolah pada Tanggal 18 Desember 2004.

Ada 2 (dua) orang responden dari golongan hakim berpendapat bahwa adanya keterbatasan kemampuan dari diri pribadi notaris dapat dijadikan alasan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek, misalnya dalam hal ketidaktahuan notaris yang bersangkutan pada ketentuan-ketentuan atau peraturan-

³³ Hasil wawancara dengan para Pengacara pada tanggal 16-17 Desember 2004.

peraturan hukum yang baru berlaku yang berhubungan dengan ruang lingkup bidang pekerjaannya tersebut.

Dalam hal ini yang dimaksud oleh para responden tersebut adalah suatu keadaan di mana begitu banyaknya suatu peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan setiap saat, di mana satu peraturan diterbitkan kemudian dicabut kembali disusul dengan diterbitkannya suatu peraturan lain yang baru dapat menyebabkan suatu keadaan yang mengakibatkan seorang notaris lalai atau khilaf akibat ketidaktahuan peraturan tersebut.

Sama halnya dengan kelompok pengacara, kelompok responden hakimpun beranggapan bahwa apabila moral dan integritas yang rendah/buruk dari seorang notaris, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan malpraktek yang tujuannya dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi atau kesejahteraan.³⁴ Hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap beberapa orang klien, dapat diperoleh ada beragam pendapat yang menyebabkan dilakukannya tindakan malpraktek oleh seorang notaris, sebagian besar di antaranya seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI
Malpraktek yang Bersumber Dari Diri
Pribadi Notaris yang Bersangkutan (n=10)

No.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Keterbatasan Kemampuan	-	0
2.	Moral dan integritas yang rendah (buruk)	2	10
3.	Tuntutan ekonomi/kesejahteraan	8	90
	Jumlah	10	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden Klien yang telah diolah pada Tanggal 16-18 Desember 2004.

³⁴ Hasil wawancara dengan para Hakim pada Tanggal 18 Desember 2004.

Kelompok responden klien menganggap bahwa tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris terjadi karena adanya moral dan integritas yang rendah/buruk dalam diri pribadi notaris yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) orang yang selanjutnya mengarah kepada tujuan utamanya yaitu pemenuhan tuntutan ekonomi atau kesejahteraan sebanyak 8 (delapan) orang. Sebaliknya tidak seorang klienpun beranggapan bahwa adanya keterbatasan kemampuan dapat dijadikan alasan sebagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris bersangkutan.³⁵

4.1.3. Faktor Pengawasan Yang Dilakukan Terhadap Notaris.

Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris bertujuan untuk mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris, oleh karena itu notaris dituntut untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam maupun di luar menjalankan tugas jabatannya tersebut.

Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian dan wewenang pernerintah, maka dari notaris dituntut adanya sikap dan watak yang tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih daripada yang berlaku pada para anggota masyarakat pada umumnya. Untuk itulah diperlukan tolak ukur dan tolak ukur yang utama bagi sikap dan watak notaris tersebut termuat dalam Kode Etik Notaris (KEN).

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama UUJN yang memberikan penjelasan tentang apa yang dinamakan notaris, tugas dan wewenangnya, maka kiranya dapat dipahami bahwa apabila sungguh-sungguh hendak dipahami

³⁵ Hasil wawancara dengan Klien pada Tanggal 16-18 Desember 2004.

kedudukan dan fungsi notaris dewasa ini tidaklah mungkin didapat gambaran yang sebenarnya mengenai hal itu apabila hanya melihatnya dari sudut peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi harus juga dilihat dari posisi notaris pada waktu sekarang ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang harus dilayaninya.

Dari uraian tersebut kiranya cukup terdapat alasan agar notaris senantiasa berada di bawah pengawasan. Adapun tujuan dari pengawasan yang dilakukan ialah agar notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundangan yang berlaku demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Bagi notaris hal seperti ini tidak hanya dituntut dari padanya oleh hukum, akan tetapi berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Baik sifat dari jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu yang mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku notaris adalah jabatan kepercayaan dan oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa tujuan dari pengawasan terhadap notaris ialah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Data penelitian yang berkaitan dengan masalah ini secara menyeluruh menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Adanya kelemahan standar profesi notaris yang dilaksanakan oleh organisasi profesi (INI) dalam pengawasan terhadap rekan sejawatnya cenderung menyebabkan terjadinya tindakan malpraktek, di mana praktek profesi notaris kini banyak disorot oleh masyarakat. Majelis kehormatan Ikatan Notaris Indonesia maupun pengurus INI telah berusaha menginventarisasikan adanya penyimpangan tugas profesi notaris baik yang melanggar etika atau peraturan hukum, hingga pelanggaran yang merupakan dimensi baru seperti kolusi dengan memberikan komisi yang merupakan perilaku korupsi tanpa mengindahkan kepentingan lainnya, membuka kantor cabang untuk memproduksi akta yang lebih banyak dan lain sebagainya.

Keikutsertaan organisasi profesi (INI) di dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap notaris diakui oleh undang-undang berdasarkan penjelasan Pasal 36 UU No. 14 Tahun 1985 sebagai berikut : ...dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri... seorang notaris yang berupa pemecatan dan pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.

Demikian pula Pasal 54 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1986 yang memutuskan bahwa :

(2) Berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayat (1) Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap... notaris yang melanggar peraturan perundang undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar usul/pendapat Ketua Mahkamah Agung dan organisasi profesi yang bersangkutan.

Pengawasan notaris tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan baik apabila

pihak yang mengawasi tersebut adalah yang menguasai dan memahami bidang notariat. Dalam hubungan ini organisasi profesi kepengurusannya harus terdiri dari notaris-notaris yang terpilih berdasarkan profesionalisme dan senioritas anggota pengurus.

UUJN telah mengantisipasi perihal pembinaan dan pengawasan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu : Majelis Pengawas Daerah (Kabupaten/Kota), Majelis Pengawas Wilayah (Propinsi) dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu : 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang dari unsur organisasi notaris dan 3 orang dari unsur akademis.

Walaupun dipahami bahwa pemenuhan tugas Majelis Pengawas harus berjalan sesuai dengan fungsinya yang ideal, namun yang perlu diketahui ialah bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat pertimbangan subjektif berkenaan dengan urusan yang menyangkut sesama rekan seprofesi tentu akan berpengaruh, walaupun kecenderungan tersebut diharapkan akan dapat dikurangi atau dihapuskan dengan adanya perilaku profesional dari notaris dan dengan adanya persyaratan organisasi INI.

Perlu dikemukakan di sini bahwa pengawasan terhadap notaris merupakan suatu pengawasan terhadap pekerjaan notaris, yakni pengawasan atas diri notaris serta pengawasan administratif. Pengawasan terhadap pekerjaan notaris yang dimaksudkan di sini adalah dengan cara pemeriksaan atau inspeksi terhadap akta-akta notaris serta repertorium dan klepper, guna melakukan penelitian apakah terjadi pelanggaran terhadap UJN atau tidak yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Sedangkan maksud

dari pengawasan atas diri notaris ialah dalam hal mengabaikan keluhuran budi atau martabat jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Adapun pengawasan administratif Majelis Pengawas berwenang memeriksa kantor-kantor notaris dalam kurun waktu 1 (satu) kali setahun. Hasil pemeriksaan tersebut harus dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM, sehingga menteri pun dalam hal ini memiliki wewenang pengawasan, yaitu pengawasan administratif mengingat kebijaksanaan penempatan, pengangkatan, pemberhentian, penentuan formasi dan penentuan wilayah jabatan dari para notaris adalah kebijakan dan wewenang dari Menteri Hukum dan HAM.

Dari hasil penelitian, ternyata keempat kelompok responden yang terdiri dari notaris, pengacara, hakim dan klien mengetahui gambaran adanya tindakan pengawasan secara umum terhadap notaris tersebut, demikian pula halnya dengan Kode Etik Notaris. Namun yang dianggap penting keberadaannya walaupun mereka tidak mengetahui secara khusus dan kurang begitu memahami, tetapi pandangan yang diberikan tidak jauh berbeda mengingat dalam profesi mereka juga dikenal adanya kode etik seperti itu. Maka peneliti di sini lebih memfokuskan pada responden notaris sebagai orang yang mengetahui keberadaannya sekaligus pula berhubungan dengan profesi yang diembannya tersebut.

Responden notaris umumnya berpendapat bahwa Kode Etik Notaris harus lebih diberlakukan dalam praktek notaris sebagai pedoman para notaris agar lebih menjunjung tinggi moral dan etikanya di dalam melaksanakan jabatannya sebagai notaris yang profesional. Walaupun efektivitas berlakunya belum memadai, hendaknya hal tersebut merupakan alasan bagi Majelis Pengawas untuk menindak notaris yang

melakukan suatu pelanggaran. Sehingga hal tersebut itulah yang membuat para responden notaris berpendapat agar Kode Etik Notaris menerapkan sanksi sehingga peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif.

Sesungguhnya selain tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, dalam organisasi profesipun ada Majelis Kehormatan yang berfungsi sebagai lembaga litigasi bagi para notaris yang melakukan suatu pelanggaran yang menyangkut penegakan Kode Etik Notaris tersebut.

Hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap beberapa orang responden notaris, dapat diperoleh pendapat mereka mengenai fungsi dan keberadaan Majelis Pengawas bagi profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VII
Pandangan Notaris Terhadap Fungsi Majelis Pengawas (n=20)

No.	Pandangan	Pendapat	Frekuensi (%)
1.	Belum berfungsi	-	0
2.	Sudah berfungsi tapi belum efektif	20	100
3.	Sudah berfungsi	-	0
	Jumlah	20	100

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan responden Notaris pada Tanggal 13-15 Desember 2004 yang telah diolah.

Menurut pendapat para notaris yang menjadi responden menyatakan bahwa Majelis Pengawas yang baru dibentuk tersebut belum berperan efektif seperti yang diharapkan banyak pihak, yakni sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut pelanggaran terhadap UUJN maupun Kode Etik Notaris itu sendiri. Hal ini disebabkan UUJN, di antara pasal-pasal yang mengatur masalah

pengawasan ini baru saja disahkan oleh DPR dan berlaku. Kemudian Majelis Pengawas itu sendiri baru saja dilantik keberadaannya untuk di pusat, yakni Majelis Pengawas Pusat dan di beberapa daerah propinsi, yakni Majelis Pengawas Wilayah yang baru ada untuk saat ini sedangkan untuk Majelis Pengawas Daerah sampai saat ini belum terbentuk. Para responden menyatakan, bahwa Majelis Pengawas diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris secara intern dan menunjukkan fungsinya yang konsisten.

4.2. Konsekuensi Yuridisnya Dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Mereka Melakukan Tindakan Malpraktek

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial, siapa dan di mana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari tanggung jawab. Pada hal setiap yang dikerjakan oleh seseorang, baik disengaja atau tanpa sengaja harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari profesi hukum. Di dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban seorang notaris khususnya dalam rangka suatu pembuatan akta, perlu kiranya ditinjau terlebih dahulu hubungan notaris dengan kliennya untuk mengetahui kapan dan dalam hal mana terjadi suatu tuntutan terhadap seorang notaris karena suatu perbuatan atau kelalaian. Apakah pemberian tugas oleh klien kepada notaris untuk membuat akta merupakan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUHPdata. Sering terjadi di dalam praktek bahwa pemberian tugas untuk pembuatan akta kepada notaris tidak dilihat sebagai suatu perjanjian antara notaris dengan klien, sebagaimana yang diatur

dalam Buku III KUHPdata, maka sebenarnya seluruh persoalan tanggung jawab kepada notaris sudah terpecahkan, karena di sini jelas bahwa hubungan notaris - klien bukanlah suatu perjanjian, akan tetapi semata-mata dikuasai oleh UUJN dan Pasal 1365 KUHPdata, di mana tanggung jawab notaris tersebut dinyatakan.

Antara notaris dengan kliennya tidak terjadi suatu perjanjian kiranya cukup dan adalah lebih tepat dengan menunjuk kepada kenyataan, bahwa notaris diangkat oleh Menteri untuk kepentingan publik, dalam pengertian yang sama seperti yang dilakukan terhadap hakim, pegawai catatan sipil dan pejabat umum lainnya. Fungsi dari pejabat-pejabat ini bersifat hukum publik. Masyarakat umum dapat menggunakan jasa para pejabat tersebut apabila mereka membutuhkannya. Sebagaimana halnya terhadap para pejabat tersebut, tidak terjadi perjanjian antara mereka dengan orang-orang yang membutuhkan jasa mereka, demikian pula halnya antara notaris dengan kliennya.

Adanya perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris setiap harinya. Oleh karena itu para notaris wajib untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Daripadanya dituntut pula kecermatan dalam menyusun perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak yang meminta bantuannya. Dari notaris dituntut sikap cermat dan hati-hati agar tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat sah nya perjanjian harus dikuasai dengan baik terutama yang berhubungan dengan kewenangan bertindak para pihak untuk membuat suatu perjanjian, sebab apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan dan nama baik notaris dipertaruhkan. Dapat saja terjadi bahwa seorang

suami yang ingin menjual harta bersama yang diperolehnya dengan isteri pertama justru bukan menghadirkan isteri pertamanya, tetapi yang datang menghadap adalah isteri keduanya yang baru saja dinikahinya. Apabila sang notaris cermat maka segera akan dapat diketahui bahwa tanah yang diperjual belikan misalnya sudah dibeli oleh pria tersebut jauh hari sebelum ia menikah dengan isteri keduanya. Hal tersebut dapat diketahui dari tanggal penerbitan peralihan sertifikat tanah yang dibeli pada tahun 1988, sedangkan pernikahan dengan isteri kedua terjadi pada tahun 1990.

Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan di Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUN. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum yang menghendaki bantuan notaris lebih dari itu. Notarispun diangkat oleh Menteri bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya tersebut.

Notaris pada waktu diminta bantuannya oleh masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan notaris oleh karena notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh undang-undang.

Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan undang-undang yang diberikan notaris merupakan bantuan dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hal ini pulalah yang membedakan pekerjaan notaris dengan pekerjaan profesi-profesi hukum lainnya.

Faktor lain yang membedakannya adalah bahwa notaris dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang telah disetujui antara kedua belah pihak pada hakekatnya dibuat dalam keadaan damai. Apabila para pihak yang datang ternyata dalam keadaan bersengketa, notaris akan menganjurkan untuk meminta bantuan kepada pengacara atau praktisi hukum lainnya. Oleh karena itu seorang notaris harus menguasai semua bidang ilmu hukum, tidak hanya hukum perdata saja melainkan pula hukum adat, hukum agraria dan sebagainya. Sehingga tugas dan tanggung jawab notaris menjadi semakin luas seiring dengan situasi dan kondisi perkembangan yang ada di masyarakat.

Pemberian kepercayaan kepada seorang notaris meletakkan tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika kepada notaris yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan adanya sifat dari jabatan notaris sendiri maupun keluhuran martabat jabatannya mengharuskan adanya tanggung jawab dari kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan kepercayaan yang dipangku oleh notaris berarti seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat umum yang dilayaninya.

Seorang notaris dikatakan mengabaikan tugas jabatannya apabila notaris yang bersangkutan tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh undang-undang dibebankan kepadanya sebagai notaris. Sehingga tidak dapat dikatakan

bahwa seorang notaris mengabaikan tugas-tugas kewajibannya apabila notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan-pekerjaan yang diluar tugas-tugas dibebankan kepadanya oleh undang-undang.

Hukuman-hukuman dalam UUJN berlaku dalam hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lainnya yang tidak memuat ancaman hukuman, notaris tidak akan dihukum karena pelanggaran itu. Pada hakekatnya seluruh pasal-pasal yang ada dalam UUJN mengandung ancaman hukuman dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 84 dan 85 UUJN yang menyatakan bagi para pihak yang menderita kerugian dapat untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris dan selanjutnya notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Pemberhentian sementara ;
- d. Pemberhentian dengan hormat atau ;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam suatu pasal sedang dalam pasal itu sendiri tidak ada ditentukan hukuman tertentu, yakni suatu hukuman dalam arti teknis dari perkataan itu, maka terhadap notaris yang melakukan pelanggaran itu dikenakan hukuman disiplinair.

Dalam hal pertanggungjawaban notaris, kerjasama antara pihak kepolisian dengan INI harus terjalin dengan baik sehingga masalah dapat terpecahkan secara

tuntas. Berdasarkan hasil penelitian, kecenderungan yang penulis amati adalah bahwa seringkali orang berpandangan bahwa dalam hal ternyata keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak (dikemudian hari diketahui) tidak benar atau yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, diartikan atau dinilai bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu palsu. Padahal akta notaris sengaja dibuat untuk memenuhi dan atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Akta notaris merupakan bukti perbuatan hukum perdata dan bukan serta tidak boleh dinilai sebagai bukti perbuatan melawan hukum atau adanya tindak pidana. Selain itu isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian bahwa :

- a. Apabila akta tersebut dipergunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu ;
- b. Pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Adalah tidak mungkin di dalam pembuatan suatu akta *partij* (di mana para pihak datang kepada notaris agar notaris mengkonstatir keterangan yang diberikan di dalam suatu akta otentik) secara palsu notaris pelaku utamanya, kecuali perbuatan yang dapat dihukum itu merupakan perbuatan “pemalsuan” yang dilakukan oleh notaris terhadap akta itu, dalam hal mana notaris menjadi pelaku utama. Kemungkinan lain adalah dalam pembuatan akta *relaas* (akta pejabat) di mana notaris mencantumkan keterangan-keterangan dari notaris sendiri mengenai semua apa yang didengar dan disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya yang diucapkan atau

dilakukan oleh pihak lain dihadapannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam hal ini hanya notaris yang menjadi pelakunya dan apabila terjadi demikian maka ia dapat diancam dengan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP. Namun dalam kasus tersebut perlu dipertanyakan apakah di dalam perbuatan yang dapat dihukum itu notaris mempunyai peran serta, jika ada sampai seberapa jauh keterlibatan notaris dalam hal tersebut.

Adanya peran serta dari notaris yang bersangkutan di dalam perbuatan yang dapat dihukum itu harus dibuktikan. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka terhadap notaris yang bersangkutan hanya dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam UUJN.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban notaris selanjutnya, penulis dapat mengatakan bahwa sebaiknya notaris menolak saja suatu pembuatan akta yang dapat menimbulkan keraguan-raguan dalam diri notaris yang bersangkutan. Terutama pada pembuatan suatu akta di mana pihak yang kedudukannya lebih kuat tetap pada pendiriannya, sehingga perjanjian tersebut berat sebelah atau tidak seimbang. Mungkin notaris yang bertindak seperti itu akan kehilangan klien, namun lama kelamaan notaris tersebut akan memperoleh nama baik, akan terkenal sebagai notaris yang dapat diandalkan, seorang notaris yang aktanya dapat dipertanggungjawabkan dengan tolak ukurnya yaitu adanya itikad baik.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nampaknya masih ada rasa enggan dari para notaris untuk menanyakan sesuatu hal yang kurang dimengerti kepada sesama rekan atau teman sejawat. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat saja mempengaruhi seorang notaris untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu.

Pekerjaan notaris tidak hanya pekerjaan karena jabatan mereka yang berdasarkan undang-undang saja, tetapi juga memperhatikan adanya pekerjaan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan di luar undang-undang dan norma-norma tertentu yang diberikan standar oleh kode etik profesi tersebut.

Oleh karena itu perlu dipahami oleh para notaris dengan sebaik-baiknya dalam upaya peningkatan profesionalisme, ialah mengenai tanggung jawab notaris. Hal ini sangat penting, karena adanya pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab diharapkan seorang notaris akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Adapun tanggung jawab tersebut dapat bersumber dari : ³⁶

1. Hukum Perdata ;
2. Hukum Fiskal ;
3. Hukum Pidana dan ;
4. Hukum Notariat.

Tanggung jawab dari yang satu pada hakekatnya tidak mengecualikan tanggung jawab dari yang lain. Bahkan sebaliknya, banyak tindakan hukum atau kelalaian yang dapat menimbulkan tuntutan perdata disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), juga dapat memberikan alasan untuk memperlakukan ketentuan dalam Pasal 84 dan 85 UUJN atau sanksi Hukum Pidana. Akumulasi sanksi pidana dan sanksi berdasarkan Pasal 84 dan 85 UUJN dapat pula terjadi.

Tanggung jawab perdata praktis adalah yang terberat, dikatakan demikian, karena tuntutan pidana yang sifatnya berat harus ada kesalahan yang sungguh-sungguh berat. Akan tetapi tuntutan perdata dapat menyangkut dalam jumlah besar, dapat terjadi

³⁶ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit.* hal. 42.

disebabkan kesalahan yang sebenarnya merupakan kesalahan yang bukan begitu dapat dipertanggung jawabkan kepada seorang notaris.

Sedangkan menurut Hermien Hadiati Koeswadji,³⁷ tanggung jawab seorang notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi etis. Tanggung jawab dari segi yuridis dapat dibagi dari segi hukum perdata dan hukum pidana.

Masalah tanggung jawab dari segi hukum perdata ini timbul, karena adanya perjanjian pekerjaan antara notaris dan klien, seperti disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang secara khusus pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN serta Pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pidana, pelanggaran secara formil atas peraturan hukum pidana saja tidak cukup untuk dijadikan alasan menjatuhkan pidana. Pelanggar tersebut juga harus dalam keadaan mampu bertanggung jawab atau mempunyai kesalahan. Sedangkan tanggung jawab notaris dari segi etis meliputi ketaatan terhadap sumpah jabatan notaris dan hal ini merupakan landasan bagi Kode Etik Profesi.

Menurut Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN notaris bertanggung jawab terhadap para pihak bersangkutan :

- a. Dalam hal, di mana itu ditetapkan secara tegas dalam UUJN ;
- b. Apabila suatu akta, karena adanya cacat dalam bentuk hanya merupakan sebagai suatu akta yang dibuat di bawah tangan ;

³⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat Ed. Januari – Oktober No. 22 – 25 Tahun VII, IN., 1992, hal. 122 – 126.

- c. Dalam semua hal, menurut Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Jadi sepanjang yang menyangkut hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUDN, sebelum notaris yang bersangkutan dapat dihukum untuk membayar uang ganti rugi, bunga dan biaya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :³⁸

1. Adanya diderita kerugian ;
2. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan pelanggaran atau kelalaian dari notaris ;
3. Bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Untuk membuktikan adanya diderita kerugian pada umumnya tidak begitu sulit, sekalipun besarnya kerugian yang diderita itu tidak selalu dapat ditetapkan secara pasti, yang sulit untuk dibuktikan adalah kedua unsur yang dimaksud pada sub b dan sub c tersebut di atas.

Kerugian yang diderita itu harus sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian notaris tersebut. Syarat lainnya, bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris dalam arti yang luas, yaitu meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan (*dolus* dan *culpa*).³⁹

Kesengajaan (*dolus*) tidak begitu menimbulkan kesulitan, karena pada hakekatnya seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, direncanakan terlebih

³⁸ Liliana Tedjosaputro, *Op.cit*, hal 43.

³⁹ *Ibid*, hal. 44.

dahulu, artinya secara insyaf dan sadar merugikan kliennya adalah merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi.

Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (*culpa*) di dalam hal ini harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subyektif dari notaris yang bersangkutan menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan suatu pertimbangan obyektif. Artinya seorang notaris yang normal dan baik seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki itu, jika notaris tersebut mengetahui, maka dalam hal ini terdapat kesalahan dan jika tidak, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.

Temuan lapangan menunjukkan seluruh responden, menyatakan tanggung jawab notaris hanya terbatas pada apa yang dikonstatirnya dalam suatu akta notariil sesuai dengan keinginan para pihak, sedangkan mengenai muatan atau materi yang ada dalam suatu akta sepenuhnya tetap merupakan tanggung jawab para pihak yang telah menyepakati perjanjian sehingga akta tersebut dibuat.⁴⁰

Apabila sampai terjadi tindakan malpraktek dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris bersangkutan selain dapat dituntut menurut hukum perdata tidak menutup kemungkinan notaris tersebut dapat juga dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

Menurut A. Kohar, mengemukakan penyebab terjadinya akta notariil keliru/bermasalah adalah :⁴¹

a. Karena kesesatan notaris ;

⁴⁰ Hasil wawancara dengan seluruh responden yang telah diolah pada Tanggal 13-18 Desember 2004..

⁴¹ A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT. Bina Indra Karya, Surabaya, 1985, hal. 10.

- b. Karena kekhilafan notaris ;
- c. Karena paksaan dan penipuan dari salah satu pihak.

Kekhilafan notaris tidak menjadi sebab kebatalan, kecuali jika salah satu pihak tidak bersedia mengadakan akta perbaikan. Dalam praktek di masyarakat, bahwa penyebab terjadinya akta notariil keliru/bermasalah adalah dari perilaku notaris itu sendiri dan juga dari perilaku klien notaris yang tidak jujur.⁴²

Dalam praktek, kesalahfahaman mungkin bisa saja timbul, karena adakalanya notaris tidak memegang prinsip dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, bahwa akta partij harus dibacakan di hadapan para pihak dalam waktu yang bersamaan dan segera ditandatangani oleh para pihak, setelah kepada para pihak ditanyakan apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan, perubahan dan ataupun tambahan atas akta tersebut, sekalipun keadaan seperti itu kadangkala terjadi karena permintaan dari para pihak sendiri, yang pada awalnya selalu menganggap semua serba mulus dan dilandasi dengan itikad baik dan saling percaya, tetapi dalam perjalanan waktu bisa terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan bunyi pasal-pasal dalam suatu akta, bahkan tidak jarang dapat timbul sengketa di antara para pihak, sehingga dapat melibatkan notaris di hadapan siapa akta tersebut dibuat, minimal diperlukan kehadirannya oleh Pengadilan sebagai saksi.

Dalam prakteknya di masyarakat, ternyata tidak selamanya suatu akta notaris itu dibuat sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus yang terjadi dan telah diputuskan sampai ke Mahkamah Agung, antara lain :

⁴² *Ibid*, hal. 15.

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1753 K/Pid/1990, tanggal 19 September 1991, yang menghukum seorang notaris di Banjarmasin, bersalah melakukan penggelapan surat berharga dan pemalsuan surat dalam proses pembuatan suatu akta notaris.⁴³
2. Putusan Mahkamah Agung No. 219 K/Pdt/1992, tanggal 30 Juni 1994, yang menyatakan seorang notaris di Semarang telah melakukan perbuatannya melawan hukum dan menyatakan akta yang dibuatnya batal demi hukum setidak-tidaknya dinyatakan batal.⁴⁴
3. Gugatan perkara Notaris Stephanus Sindhunatha, SH, Perkara Pidana No. 1175/Pid. S/1994/PN Surabaya.

DAKWAAN/PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Stephanus Sindhunatha, SH pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tetapi dalam bulan April 1989 atau setidak-tidaknya antara tahun 1989 dan tahun 1990, bertempat di Jalan Raya Nginden No. 82 Surabaya atau di Manyar Tirtoyoso Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 119/K/1981 dan No. 125 Tahun 1971.

⁴³ Varia Peradilan No. 76 Edisi Januari, 1992, hal. 68 – 91.

⁴⁴ Varia Peradilan No. 113 Edisi Pebruari, 1995, hal. 5–36.

PERISTIWA/SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Stephanus Sindhuntha, SH pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan pada dakwaan primair di atas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang suatu hak milik atas tanah Negara atau tanah partekelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut, demikian terdakwa setelah mendapat surat konfirmasi dari PT. DELTA Jakarta tanggal 23 Januari 1989 No. 31/Dirs/018/89, yang isinya antara lain :

Butir 5 : Sdr. Stephanus Sindhunatha, SH akan segera menghubungi PT. DELTA Jakarta apabila telah menemukan calon pembeli yang potensial, akan tetapi terdakwa setelah mendapat pembeli yang potensial, yaitu Tirto Utomo, SH di Jl. Sukabumi No. 1 Jakarta atau orang lain dengan harga yang disepakati Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tidak lagi menghubungi PT. DELTA Jakarta langsung saja mengadakan transaksi jual beli dan menerima uang harga tanah Jl. Nginden Raya No. 82 Surabaya sebesar Rp. 295.000.000,-. Kemudian membeli sebidang tanah dengan uang tersebut tanpa persetujuan dari PT. DELTA Jakarta, padahal terdakwa tahu tugasnya sesuai surat konfirmasi tanggal 23 Januari 1989 adalah sebagai agen atau perantara mencari pembeli yang potensial.

MENGADILI :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah untuk itu harus

dihukum. Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya dengan memperhatikan pasal-pasal dari KUHP, KUHPA dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini mengadili dan menyatakan terdakwa Stephanus Sindunatha, SH bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, atas dasar ketidak berhasilan Penuntut Umum di dalam membuktikan surat dakwaannya dan begitu juga kesalahan Pengadilan Negeri Surabaya di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang akhirnya menghukum terdakwa Stephanus Sindunatha, SH.

Kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 12 Desember 1995 No. 248/Pid/1995/PT Surabaya, dengan menimbang bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diajukan di dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima dengan menimbang dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya masing-masing telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permintaan banding dari terdakwa Stephanus Sindunatha, SH tersebut, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Juni 1995 No. 1175/Pid. S/1994/PN Surabaya yang dimintakan banding tersebut dengan mengadili sendiri dan menyatakan perbuatan

yang didakwakan terhadap terdakwa Stephanus Sindunatha, SH dalam dakwaan Primair terbukti, tetapi tidak merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran untuk itu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Maka berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melalui kuasa hukumnya memohonkan kehadiran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta agar berkenan memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut.

Dengan menimbang bahwa putusan mana dalam pemeriksaan pada Tingkat Banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 12 Desember 1995 No. 248/Pid/1995/PT Surabaya, melalui Putusannya Reg. No. 1021 K/Pid/1996 Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam Tingkat Kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi : Penuntut Umum/Jaksa terhadap dakwaan Primair tersebut, menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Penuntut Umum/Jaksa terhadap dakwaan Subsidair tersebut.

Dari berbagai contoh kasus seperti tersebut di atas, menurut pendapat penulis tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sehari-hari sebagai jabatan kepercayaan dari masyarakat maupun otentisitas suatu akta notaris baik formalitas pembuatannya maupun isinya untuk itu harus dikaji kembali lagi agar

tidak timbul suatu masalah hukum dikemudian hari, baik itu terjadi akibat ketidakjujuran dari klien maupun akibat dari tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris itu sendiri.

4.3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Sehari-hari.

Perlindungan hukum bagi notaris dipandang perlu mengingat kedudukan notaris selaku pejabat umum seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang ruang lingkup tugasnya lebih luas daripada yang tercantum dalam Pasal 1 UUJN tersebut. Selain itu tidak jarang bahwa masih terjadi dalam praktek sehari-hari adanya tindakan-tindakan yang merugikan diri notaris dalam kaitan dengan tugasnya tersebut. Rasa aman dan tenang akan ada bilamana diberikan perlindungan hukum secukupnya bagi notaris.

Organisasi atau kelompok profesi dalam hal ini INI mempunyai kewajiban moral untuk memberikan perlindungan bagi kelompok profesinya termasuk segenap anggotanya. Perlindungan di sini berarti bahwa INI harus selalu terpelihara dari noda, rela dan tidak dirusak citra wibawanya. Dengan demikian maka kerja sama antara INI dengan penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia adalah satu-satunya pilihan cara yang paling tepat demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan dalam arti yang hakiki. Sehubungan dengan hal tersebut telah terbit Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dengan INI tanggal 27 Oktober 1998 dan Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat akta Tanah (IPPAT) tanggal 9 Maret 1999 yang berisi tata cara mengenai pemanggilan

kepada notaris, pemeriksaan terhadap notaris dan bagaimana ketentuan penyitaan akta-akta notaris.

Adanya peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh notaris yang mendasari pelaksanaan tugasnya dimaksudkan agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas yang dibebankan kepada notaris tersebut. Selain itu memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Oleh undang-undang notaris diberikan kepercayaan untuk memberikan kepastian hukum bagi para warga masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan dan tugas notaris didasarkan pada kepercayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

Sebagai konsekuensi logis, maka adanya kepercayaan tersebut memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya sebagai pertimbangan dari adanya pengawasan yang dilakukan terhadap notaris, perlu pula diperhatikan adanya perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugasnya tersebut.

Dalam penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa contoh mengenai tindakan-tindakan terhadap notaris sehubungan dengan perlindungan hukum tersebut yang merupakan tanggapan, pandangan, komentar dari para responden notaris dengan melihat praktek di lapangan. Misalnya antara lain : ⁴⁵

⁴⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat Ed. April – Juni, INI, 2002, hal. 3.

- a. Notaris yang diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara ;
- b. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat (perkara perdata) ;
- c. Penyitaan bundel minuta yang ada pada notaris.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Notaris sebagai saksi dalam suatu perkara

Kewajiban untuk hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di depan pengadilan merupakan kewajiban setiap warga atau anggota masyarakat. Imunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya yang oleh undang-undang dan peraturan lain dilindungi. Imunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kiranya tidak perlu diragukan bahwa bagi notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian yakni sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya. Sumpah jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan. Hal ini berarti notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa-apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya baik berupa akta partij maupun akta pejabat. Berdasarkan ketentuan tersebut notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban untuk tidak bicara ini didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, yang hanya

memberikan hak untuk tidak bicara dengan menuntut penggunaan hak ingkarnya, akan tetapi berdasarkan sumpah rahasia jabatan Pasal 4 UUJN. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta-akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam pasal tersebut mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 (3) KUH Perdata.

Perlu diketahui bahwa tidak semua apa yang diberitahukan oleh klien kepada notaris dicantumkan dalam akta. Disamping itu kepada notaris banyak hal-hal yang disampaikan oleh klien bukan dalam kedudukannya sebagai notaris, akan tetapi sebagai ahli yang memberikan penjelasan hukum. Walaupun undang-undang tidak memuat ketentuan yang secara tegas melarang notaris untuk tidak bicara mengenai hal itu, namun sebagaimana telah dikemukakan notaris mempunyai kewajiban untuk tidak bicara mengenai hal tersebut. Hal itu dikarenakan sifat dan jabatan notaris dengan sendirinya membawa kewajiban ini. Notaris adalah orang kepercayaan, dengan demikian hak ingkar tidak hanya dapat diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga hanya terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan.

Notaris harus mengetahui sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkarnya tersebut, karena dalam prakteknya setiap saat ada kemungkinan dihadapkan pada hal-hal di mana notaris harus menentukan sendiri dengan memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku. Disamping itu notaris harus mengingat adanya sanksi berupa hukuman atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan notaris karena pelanggaran terhadap Pasal 4 UUJN, sehingga merupakan keharusan bagi notaris untuk dengan sungguh-sungguh

mengetahui kapan mempergunakan hak ingkarnya. Disatu pihak notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta-aktanya dengan ancaman hukuman-hukuman seperti yang disebut di atas, apabila notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sedang dilain pihak kepada notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu, juga dengan adanya sanksi, apabila notaris tidak memenuhinya sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai peraturan-peraturan itu di dalam praktek yang sering pula mengakibatkan terjadi ketegangan antara notaris dengan polisi, penuntut umum atau hakim.

Namun hal ini tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 UUN. Menurut pendapat yang umum dianut kewajiban untuk tidak bicara bagi notaris dikesampingkan dalam hal-hal di mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris untuk memberikan kesaksian, misalkan dalam masalah pajak. Namun hal ini sulit untuk menentukan bilamana dan dalam hal-hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi. Namun hal tersebut tidak diberlakukan begitu saja, melainkan diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk itu dan dengan kewajiban bagi yang bersangkutan untuk merahasiakan apa yang diketahuinya di dalam menjalankan tugasnya tersebut.

- b. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat (perkara perdata).

Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan kepada publik dibidang pelayanan jasa hukum, terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas.

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggungjawabannya, sehingga untuk hal tersebut kepadanya berlaku mekanisme perlindungan yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Sedangkan terhadap kesalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya, notaris perlu diberi perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan praktek profesi notaris adalah organisasi profesi notaris, dalam hal ini INI. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran yang dilakukan notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme. Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tenteram dan jaminan perlindungan hukum terhadap notaris di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Bagi notaris akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara profesional oleh organisasi profesinya (yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi yang bersifat disipliner berdasarkan etika dan moral).

c. Penyitaan terhadap bundel minuta yang ada pada notaris.

Penyitaan barang bukti berupa minuta akta yang disimpan notaris dimaksudkan selain sebagai kelengkapan berkas juga adanya kewajiban pembuktian melalui pemeriksaan secara laboratorium terhadap asli tandatangan/cap jempol maupun tulisan yang termuat dalam akta otentik tersebut.

Penyitaan terhadap surat-surat yang berada pada pemegang rahasia jabatan dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum berlaku juga ketentuan Pasal 43 KUHAP. Untuk menghindari salah pengertian tentang penggunaan istilah penyitaan terhadap akta-akta atau surat-surat yang ada pada notaris di mana protokol notaris adalah milik negara, maka pengertian penyitaan di sini bukan dalam arti *beslag*. Protokol notaris adalah bukan milik notaris tetapi milik negara yang disimpan oleh notaris. Tetapi apabila kepentingan hukum publik penyitaan harus dilakukan, maka sebaiknya hanya atas perintah atau dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, bukan atas persetujuan notaris. Demikian pula halnya dalam proses di mana seorang notaris diperintahkan oleh pengadilan untuk membawa bundel minuta dari akta-aktanya, seharusnya ada penetapan terlebih dahulu dari pengadilan negeri yang bersangkutan.

Karena minuta akta tersebut merupakan suatu arsip negara yang terikat atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi dari pada minuta akta tersebut sebagai arsip negara, maka jika penyidik memerlukan penyitaan barang-barang berupa minuta akta, harus diambil jalan sebagai berikut :

1. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat di mana akta minuta notaris berada dengan menjelaskan secara rinci relevansi dan pentingnya untuk membahas minuta akta tersebut.
2. Setelah Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan dengan masak-masak dan secermatnya terutama mengenai relevan tidaknya dan penting tidaknya penyidik melihat maupun memperoleh salinan/kutipan minuta akta yang disimpan notaris

yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan menentukan dalam penetapannya apakah permohonan penyidik tersebut dikabulkan atau tidak.

3. Jika izin khusus yang dimaksud Pasal 43 KUHPA tersebut dikeluarkan artinya i penyidik hanya diizinkan untuk membuat foto copy dari minuta yang bersangkutan yang kemudian keabsahannya sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan. Foto copy tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti dipersidangan, oleh notaris selanjutnya dibuat berita acara foto copy tersebut dan dilampirkan pada minuta akta.

Dengan demikian maksud penyidik dalam rangka tugasnya tersebut sudah cukup dan bagi notaris yang bersangkutan dengan adanya izin tersebut akan terhindar dari sanksi sesuai ketentuan Pasal 4 UUJN.

Maka dengan demikian pengertian melihat sebagaimana penetapan izin khusus Ketua Pengadilan perlu disepakati untuk ditafsirkan sebagai kesempatan penyidik untuk memeriksa secara laboratorium, karena dari copy minuta akta pemeriksaan laboratorium tidak bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam prakteknya karena minuta akta terikat dan terjahit dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, maka penyidik membawa buku protokol tersebut dengan dikawal dan diawasi serta waktu tertentu sesuai kebutuhan dengan maksud memeriksa minuta akta secara laboratorium. Setelah itu, segera dikembalikan dengan melampirkan berita acara kegiatan dan selanjutnya hanya copy minuta akta yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Koordinasi antara Polri selaku penyidik dan jajaran notaris dalam mengantisipasi timbulnya tindak kejahatan pemalsuan surat dan proses penyidikan tindak kejahatan

pemalsuan surat perlu ditingkatkan, sehingga terwujud kadar koordinasi yang mantap dan dinamis.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, para responden dari kelompok notaris umumnya berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi notaris harus melibatkan pihak organisasi profesi dalam hal INI sebagai suatu wadah yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di antara anggotanya. Di lain pihak kerjasama yang baik juga diperlukan antara INI dengan para anggotanya sendiri. Khusus mengenai laporan yang melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan supaya dikonsultasikan dengan pihak pengurus INI baik cabang maupun daerah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.⁴⁶

Menurut seluruh responden, perlindungan hukum yang diberikan terhadap notaris baik mengenai kesalahan yang bersifat pribadi maupun dalam menjalankan tugas jabatannya adalah untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi.⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan para Notaris yang telah diolah pada Tanggal 13-15 Desember 2004.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan seluruh responden yang telah diolah pada Tanggal 13-18 Desember 2004.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Faktor sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan terhadap notaris merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang notaris untuk melakukan suatu tindakan malpraktek. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan, moral dan integritas yang rendah/buruk serta tuntutan ekonomi/kesejahteraan dari diri notaris yang bersangkutan. Sumber daya manusia yang berasal dari notaris yang bersangkutan merupakan faktor yang paling dominan sekaligus merupakan sebab atau hal pendorong utama dilakukannya tindakan malpraktek oleh notaris tersebut.
- 5.1.2. Konsekuensi yuridis dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktek dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika. Tanggung jawab berdasarkan hukum merupakan hukuman-hukuman yang diberlakukan dalam UUJN dan tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri kepada notaris. Sedangkan tanggung jawab moral etika adalah sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat sebagai organ pengawas dalam INI.

- 5.1.3. Perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari adalah berkaitan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan tidak hanya yang dicantumkan dalam akta (isi akta) tetapi juga pada semua apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku notaris yang didasarkan pada Pasal 4 UUJN, di mana selanjutnya pemeriksaan terhadap notaris harus ditempuh dengan cara atau prosedur yang telah ditetapkan.

5.2. Saran-saran

- 5.2.1. Para notaris harus lebih cermat dan teliti dengan apa yang diperbuatnya dalam pembuatan akta-akta notariil, di samping harus selalu ingat pada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang terdapat dalam UUJN, sehingga terhindari dari tindakan pelanggaran yang menjurus kepada tindakan malpraktek.
- 5.2.2. Diharapkan agar seorang notaris selalu menjalankan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya disertai pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
- 5.2.3. Hendaknya ada kerjasama yang baik antara organisasi profesi, yakni INI dengan para pihak yang terkait dalam hal membela para notaris di sidang Pengadilan. Hal ini sangat perlu guna menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi, khususnya dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi dan terhadap penyitaan akta-akta notaris. Oleh karena setiap pencelaan terhadap notaris akan berdampak negatif baik kepada diri pribadi notaris yang bersangkutan maupun pada organisasi profesi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU :

- Andasasmita, Komar, 1981, **Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya**, Sumur, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 2000, **Metodologi Research Jilid I**, ANDI, Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1985, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Herkutanto dan Soerjono Soekanto, 1987, **Pengantar Hukum Kesehatan**, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Kohar, A., 1985, **Notaris dan Persoalan Hukum**, PT. Bina Indra Karya, Surabaya.
- K. Lubis, Suhrawardi, 2000, **Etika Profesi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2003, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Kartono dan Soerjono Soekanto, 1983, **Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia**, Grafiti Pres, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1985, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- S.T. Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil, 1997, **Pokok-pokok Etika Profesi Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1991, **Profesi Dokter (Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter)**, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, **Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1991, **Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana**, CV. Agung, Semarang.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1996, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta.

Thong Kie, Tan, 2000, **Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris Buku I**, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

-----, 2000, **Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris Buku II**, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Wasito, Hermawan dkk, 1990, **Pengantar Metodologi Penelitian (Buku Panduan Mahasiswa)**, APTIK, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MENTERI :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

MAJALAH :

Adjie, Habib, 2002, **Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan Sistem**, Media Notariat Edisi April-Juni, INI, Jakarta.

Iswahyudi Sudono, **Hak Ingkar Notaris Tak Berlaku Dalam Tindak Pidana Korupsi**, Jurnal Renvoi No. 1.13.II Tahun Kedua, Juni 2004.

Koeswadi, Hermien Hadiati, 1992, **Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHAP**, Media Notariat Edisi Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, Jakarta.

Lotulung, Paulus Effendi, 2002, **Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya**, Media Notariat Edisi April-Juni, INI, Jakarta.

Nico, **Notaris dan Tanggung Jawab Pidana**, Jurnal Renvoi No. 4 Tahun Kedua, September 2004.

Varia Peradilan No. 76 Edisi Januari Tahun 1992.

Varia Peradilan No. 113 Edisi Pebruari Tahun 1995.

MAKALAH :

Poernomo, Bambang, 1999, **Kelemahan Standar Profesi Notaris Cenderung Tumbuh Malpraktek dan Kejahatan Kera Putih**, Ceramah Umum pada Kongres XVII INI, Jakarta.